

Dinamika VOC di Nusantara 1602-1799: dari Monopoli Perdagangan, Perlawanan, Hingga Pembubaran

Ramlan Anri Sianturi¹ Jesika Febrianty Manalu² Intan Rezkinah³ Erika Afrilia Saputri⁴
Rosmaida Sinaga⁵

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: anrisianturi82@gmail.com¹ manalujesika3@gmail.com² intanrezkinah32@gmail.com³
rika37020@gmail.com⁴ rosmaidasinaga@unimed.ac.id⁵

Abstract

This study examines the history, policies, and impact of the Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) in Indonesia during the colonial era. Founded in 1602, the VOC was a Dutch trading company with extensive influence that functioned as a political and military force in addition to being a commercial entity. This article discusses the organizational structure of the VOC under the leadership of the Heeren Zeventien, various economic policies implemented, such as extortion, contingenten, verplichte leverantie, octroi rights, VOC Hongi voyages, and the Preanger system, as well as the monopoly on the spice trade in the Indonesian archipelago. This study also analyzes the impact of VOC policies on Indonesians who were the targets of economic and social exploitation and political pressure related to regional governance. Resistance from other sultanates, such as Mataram and Gowa, indicated a decline in VOC dominance. This study also discusses the impact of VOC policies on Indonesians who experienced economic exploitation, social suffering, and restrictions on the political sovereignty of local kingdoms. Resistance from various sultanates such as Mataram and Gowa showed rejection of VOC power. The decline of the VOC was caused by internal factors such as corruption and inefficient organization, as well as external factors such as competition with other European countries and changes in the global market; therefore, the VOC was dissolved in 1799.

Keywords: VOC, Archipelago, Colonial Exploitation

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sejarah, kebijakan, dan dampak Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di wilayah Indonesia selama era kolonial. VOC, yang didirikan pada tahun 1602, adalah perusahaan dagang Belanda dengan wilayah pengaruh yang luas yang berfungsi sebagai kekuatan politik dan militer selain sebagai entitas dagang. Artikel ini membahas struktur organisasi VOC di bawah kepemimpinan Heeren Zeventien, berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan, seperti pemerasan, contingenten, verplichte leverantie, hak octroi, pelayaran Hongi VOC, dan sistem Preanger, serta monopoli perdagangan rempah-rempah di kepulauan Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis dampak kebijakan VOC terhadap warga Indonesia yang menjadi sasaran eksploitasi ekonomi, sosial, dan tekanan politik terkait pemerintahan regional. Perlawanan dari kesultanan lain, seperti Mataram dan Gowa, menunjukkan penurunan dominasi VOC. Penelitian ini juga membahas dampak kebijakan VOC terhadap penduduk Indonesia yang mengalami eksploitasi ekonomi, penderitaan sosial, dan pembatasan kedaulatan politik terhadap kerajaan-kerajaan lokal. Perlawanan dari berbagai kesultanan seperti Mataram dan Gowa menunjukkan penolakan terhadap kekuasaan VOC. Kemunduran VOC disebabkan oleh faktor internal seperti korupsi dan organisasi yang tidak efisien, serta faktor eksternal seperti persaingan dengan negara-negara Eropa lain dan perubahan di pasar global; oleh karena itu, VOC dibubarkan pada tahun 1799.

Kata Kunci: VOC, Nusantara, Eksploitasi Kolonial



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) merupakan salah satu entitas kolonial paling berkuasa dalam sejarah Indonesia dan sistem ekonomi, politik, serta sosialnya selama hampir

dua abad. Didirikan pada tahun 1602, VOC bukan sekadar perusahaan dagang biasa, melainkan organisasi yang memiliki kekuasaan layaknya negara dalam negara, dengan hak eksklusif (octrooi) untuk memonopoli perdagangan, membentuk pasukan, mencetak koin, dan menandatangani perjanjian dengan penguasa lokal. Kehadiran VOC di Kepulauan Indonesia awalnya dipicu oleh persaingan sengit di antara pedagang Belanda dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan rempah-rempah, yang mengakibatkan penurunan harga di pasar Eropa. Awalnya, VOC dimulai sebagai perusahaan dagang, tetapi karena memiliki hak istimewa, ia berkembang menjadi organisasi politik dan militer yang sangat berpengaruh di Hindia Timur. Transformasi VOC dari entitas dagang menjadi kekuatan kolonial memiliki dampak yang sangat luas dan mendalam terhadap kehidupan masyarakat Kepulauan Indonesia, terutama melalui aspek ekonomi yang dieksploitasi VOC menggunakan berbagai kebijakan yang sangat hegemonik dan paksa. Untuk menegakkan aturan monopoli ini, VOC menggunakan instrumen kekerasan yang dikenal sebagai hongitochten (pelayaran Hongi) (Sartika et al., 2025).

Kebijakan ekonomi monopolistik VOC telah mengubah struktur perdagangan di pulau-pulau di wilayah tersebut dan menyebabkan penderitaan bagi penduduk lokal. Kebijakan ekonomi yang dirancang dan diterapkan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di sepenuhnya wilayah Indonesia berorientasi pada monopoli perdagangan rempah dan komoditas ekspor. (Sinaga, Putri, Siagian, Zikri, et al., 2025). Sistem monopoli yang diterapkan oleh VOC mencakup berbagai langkah dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan VOC dengan mengorbankan kesejahteraan penduduk asli, seperti hak eksterpasi, contingenten, verpichte leverantie, Hongi sailing, dan Preangerstelsel. VOC tidak hanya memonopoli perdagangan rempah-rempah tetapi juga rute pelayaran penting dengan menerapkan sistem pasbrief (sejenis izin jalan) yang mewajibkan setiap kapal, termasuk kapal asli, untuk memiliki izin berlayar dari VOC, sementara setiap kapal yang tidak berizin dapat disita bersama muatannya. Praktik monopoli dalam perdagangan tidak hanya mengakibatkan punahnya jaringan perdagangan tradisional yang telah beroperasi selama berabad-abad, tetapi juga menciptakan kemiskinan struktural, kerja paksa, dan hilangnya kedaulatan politik bagi kerajaan-kerajaan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif sejarah pembentukan VOC, struktur organisasinya, kebijakan ekonomi yang diterapkan, praktik monopoli perdagangan, dampaknya terhadap masyarakat Indonesia, bentuk-bentuk perlawanan, serta faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan pembubaran VOC pada tahun 1799.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen historis yang relevan dengan topik VOC dan kebijakan kolonialnya di Kepulauan Indonesia. Analisis melibatkan penelusuran karya-karya yang membahas sejarah pembentukan VOC, struktur organisasi, kebijakan ekonomi dan politik, praktik monopoli perdagangan, dampak terhadap masyarakat Indonesia, bentuk-bentuk perlawanan rakyat, serta faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan pembubaran VOC. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan pengaruh VOC dalam sejarah Indonesia, teknik analisis data yang digunakan yaitu identifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah lahirnya VOC

Kehadiran VOC di Nusantara merupakan hasil dari proses historis yang panjang dan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui rangkaian dinamika ekonomi, politik, dan kompetisi

global pada akhir abad ke-16. Pada masa itu, rempah-rempah dari Asia Tenggara terutama dari Maluku menjadi komoditas yang sangat bernilai di pasar Eropa. Portugis awalnya menguasai jalur perdagangan ini, namun dominasi mereka mulai melemah akibat ketidakstabilan internal, perang dengan Spanyol, dan menurunnya efektivitas pengawasan terhadap koloni-koloni mereka di Asia. Kondisi ini mendorong bangsa Belanda untuk mencari jalur dagang langsung tanpa melalui perantara Portugis. Pelayaran pertama Belanda ke Nusantara yang dipimpin Cornelis de Houtman pada tahun 1596 menjadi momentum penting dalam membuka kontak awal Belanda dengan wilayah Indonesia. Walaupun ekspedisi tersebut belum memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan, pelayaran itu menghasilkan pengetahuan strategis mengenai rute laut, situasi politik kerajaan-kerajaan lokal, potensi pasar, serta letak pusat-pusat produksi rempah. Oleh karena itu, kedatangan tahun 1596 dipandang sebagai titik awal keterlibatan Belanda di Nusantara, meskipun VOC sebagai organisasi belum terbentuk pada waktu tersebut.

Keberhasilan ekspedisi pertama tersebut memicu peningkatan jumlah pelayaran yang dilakukan oleh berbagai kelompok pedagang Belanda. Namun, aktivitas perdagangan yang dilakukan secara terpisah oleh banyak perusahaan justru menimbulkan persaingan yang destruktif. Mereka saling menekan harga beli rempah, memperebutkan jalur yang sama, dan meningkatkan biaya operasi sehingga keuntungan yang diperoleh semakin kecil. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Belanda mengambil langkah strategis untuk mengintegrasikan seluruh perusahaan dagang ke dalam satu organisasi besar agar dapat menghilangkan persaingan internal dan memperkuat posisi Belanda di kawasan Asia. Pada 20 Maret 1602, Staten-Generaal secara resmi membentuk Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Melalui pemberian hak istimewa (*octrooi*), VOC bukan sekedar menjadi kongsi dagang, namun juga memperoleh kewenangan politik dan militer, termasuk hak untuk memonopoli perdagangan, membuat perjanjian dengan penguasa lokal, membangun benteng, mengangkat pejabat, dan melancarkan tindakan militer. VOC sebagai kongsi dagang dibentuk untuk menghindari persaingan antarpedagang Belanda. Setelah VOC berdiri, lebih banyak kapal dikirim ke Asia dan perolehan monopoli pada region itu diakibatkan oleh hak *octrooi* (*piagam*) yang dimilikinya (Sinaga, Pakpahan, et al., 2024). Dengan demikian, VOC beroperasi sebagai entitas yang memiliki otonomi luas, menyerupai negara di wilayah koloninya.

Setelah berdiri, VOC segera memulai proses konsolidasi kekuasaan di Nusantara secara terencana. Pada tahun 1610, Pieter Both, sebagai Gubernur Jenderal pertama VOC, mendirikan pos dagang resmi di Banten, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat perdagangan internasional terpenting di Jawa. Pos dagang ini menjadi pijakan awal bagi VOC untuk memperluas pengaruhnya dalam jaringan perdagangan rempah. Konsolidasi kekuasaan VOC mencapai titik penting pada tahun 1619 ketika Jan Pieterszoon Coen menyerbu dan menghancurkan Jayakarta. Kota tersebut kemudian dibangun kembali dengan nama Batavia dan dijadikan pusat administrasi, militer, dan perdagangan VOC di Asia Timur. Di bawah pemerintahan VOC, kehidupan pelabuhan Batavia mengalami transformasi yang signifikan, beralih dari gaya pelabuhan konvensional ke gaya kontemporer. Dari peta Jayakarta pada tahun 1619 hingga Batavia pada tahun 1780, ada perubahan yang terlihat (Ocsanda et al., 2024). Dari Batavia, VOC mengatur seluruh aktivitas dagang, melakukan pengawasan terhadap produksi rempah, serta memperluas kontrol politik dan ekonomi di berbagai wilayah Nusantara. Secara keseluruhan, perjalanan VOC hingga hadir dan berkuasa di Nusantara dapat dipahami sebagai rangkaian proses yang berkesinambungan. Pelayaran tahun 1596 merupakan awal mula interaksi Belanda dengan Nusantara; pembentukan VOC pada tahun 1602 menandai lahirnya organisasi dagang-politik yang terstruktur; dan periode 1610–1619 menjadi fase penguatan institusional VOC hingga terbentuknya pusat kekuasaan permanen di Batavia. Keseluruhan

tahapan ini memperlihatkan bagaimana kepentingan ekonomi mendorong Belanda membangun struktur kolonial yang akhirnya memengaruhi secara mendalam perjalanan sejarah Nusantara.

Struktur dan Sistem Organisasi

VOC memiliki struktur organisasi yang sangat kompleks dan terorganisir dengan baik, yang menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam mendominasi perdagangan di Hindia Timur selama hampir dua abad. Struktur organisasi VOC terdiri dari beberapa tingkatan yang saling terhubung, mulai dari kepemimpinan tertinggi di Belanda hingga pos-pos perdagangan di berbagai wilayah Asia. Wahyudi dan Agustono (2017) menjelaskan bahwa VOC dipimpin oleh dewan yang terdiri dari 17 direktur yang disebut Dewan Tujuh Belas atau Heeren Zeventien (de Heeren XVII). Ketujuh belas direktur tersebut mewakili enam perusahaan dagang yang bergabung menjadi VOC, yaitu perusahaan Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen. Heeren Zeventien merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dalam organisasi VOC yang berkedudukan di Belanda dan bertanggung jawab kepada Parlemen Belanda. Dewan ini memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, menentukan arah umum VOC, serta menyetujui atau menolak kebijakan yang diterapkan di Asia termasuk penunjukan gubernur jenderal. Sebagai pemegang saham terbesar, rumah dagang Amsterdam memiliki jumlah perwakilan terbanyak, yaitu delapan orang di Heeren Zeventien, sementara perwakilan lainnya berasal dari rumah dagang lainnya. Heeren Zeventien biasanya bertemu dua atau tiga kali setahun di Amsterdam atau Middleburg untuk membahas hal-hal penting terkait kebijakan, strategi, anggaran, dan laporan VOC. Struktur yang rapi ini memungkinkan VOC untuk mengoordinasikan operasi perdagangan yang tersebar luas di berbagai wilayah dengan efektif dan efisien.

Kebijakan dan Hak Istimewa VOC di Nusantara

Pada tahun 1600-an (awal abad ke-17), persaingan sengit di antara pedagang Belanda yang berlayar ke Hindia Timur menyebabkan anjloknya nilai rempah-rempah di pasar Eropa. Menghadapi situasi ini, beberapa perusahaan dagang Belanda sepakat untuk merger dan membentuk perusahaan bernama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1602. Pemerintah Belanda mendukung VOC dengan memberikan wewenang khusus (octrooy) selama 21 tahun, yang diperpanjang hingga tahun 1795. Wewenang ini menjadikan VOC sebagai satu-satunya pemegang hak perdagangan di wilayah dari Tanjung Harapan di Afrika Selatan hingga Selat Magellan di Amerika Selatan. Aktivitas VOC tidak terbatas pada perdagangan komoditas seperti rempah-rempah, tekstil, sutra, dan keramik saja, tetapi juga menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah tersebut. Mereka memiliki wewenang untuk bernegosiasi dengan raja-raja lokal, menggunakan kekuatan militer jika diperlukan, membangun benteng pertahanan, mempertahankan pasukan mereka sendiri, bahkan menunjuk pemimpin di suatu wilayah, semua tindakan ini dilakukan secara otonom. Pembentukan VOC terjadi saat Belanda sedang bersengketa dengan Spanyol dan Portugis. VOC ternyata menjadi alat Belanda untuk melawan Portugis di Asia, merebut benteng-benteng mereka, dan menguasai rute perdagangan mereka (Sinaga, Putri, Siagian, Nadia, et al., 2025). Meskipun ada penelitian yang memberikan pandangan berbeda dari kebanyakan sumber, fakta bahwa VOC merupakan korporasi raksasa pada masa itu tidak dapat dibantah. Bahkan, akibat dominasi yang sangat besar, VOC bahkan membangun pasukan militernya sendiri untuk melindungi operasi dagangnya. Oleh karena itu, penting bagi kalian mengetahui kebijakan VOC di bidang ekonomi. Berikut adalah kebijakan yang diterapkan oleh VOC di sektor ekonomi:

1. Hak Ekstirpasi. Dalam penelitian ilmu sosial, "extirpation" merujuk pada hak untuk menghancurkan dan menghilangkan area hutan. Dalam hal ini, VOC diberi wewenang untuk

menghancurkan dan memusnahkan tanaman rempah-rempah ketika panen sangat melimpah. VOC menetapkan aturan dan membuat perjanjian dengan raja-raja dan pemimpin lokal untuk menghancurkan kelebihan rempah-rempah, terutama pala dan cengkeh. Tindakan VOC ini tidak tanpa tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan pemusnahan ini adalah untuk mencegah penurunan harga rempah-rempah dalam perdagangan global selama panen ketika persediaan melimpah. Kebijakan semacam ini sangat merugikan bagi produsen rempah-rempah karena tidak ada kompensasi, sementara keuntungan hanya diperoleh oleh VOC (Etania & Indriawati, 2023).

2. *Contingenten*. Kontingen dapat diartikan sebagai pemaksaan kepada masyarakat untuk membayar pajak dalam jumlah yang ditentukan oleh VOC. Pajak tersebut harus dibayarkan dalam bentuk produk pertanian. Sayangnya, sistem kompensasi tidak diterapkan. Tujuan VOC dalam menerapkan kebijakan ini jelas, yaitu untuk menjaga keamanan dana kas mereka (Sinaga, Putri, Siagian, Nadia, et al., 2025). Banyaknya pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat disesuaikan dengan nilai yang ditentukan oleh VOC. Kebijakan ini tanpa diragukan lagi merupakan kerugian besar bagi masyarakat.
3. *Verplichte Leverantie*. Kebijakan lain yang sama merugikannya bagi masyarakat ialah *Verplichte Leverantie*. Kebijakan ini mengharuskan penduduk supaya menyerahkan hasil buminya secara eksklusif kepada VOC. Penjualan rempah-rempah kepada pihak selain VOC dilarang. Belum berakhir karena dalam hal ini, harga jual rempah-rempah telah diatur oleh VOC. Masyarakat asli dapat menjual produk-produk alam seperti kayu manis, kapas, pala, gula, cengkeh, lada, tembakau, kopi, dan sebagainya.
4. *Hak Istimewa (Hak Oktroi)*. Hak Oktroi adalah hak khusus yang diberikan kepada perusahaan dagang VOC. Kata “octroi” berasal dari bahasa Prancis “octroyer”, yang berarti izin khusus dan unik. Izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah kepada individu atau perusahaan, dan biasanya melibatkan monopoli. Piagam VOC memberikan mereka wewenang untuk berdagang. Namun, wilayah dagang mereka dibatasi pada wilayah di timur Tanjung Harapan dan sedikit ke selatan di sekitar Selat Magellan. Tujuan dari hak-hak tersebut adalah untuk memperkuat posisi VOC. Hak-hak ini membuat VOC sebagai negara dalam sebuah negara. Hak-hak Oktroi yang diproklamirkan oleh VOC ialah sebagai berikut:
 - a. Membentuk pasukan militer.
 - b. Menerapkan sistem monopoli perdagangan di tempat yang telah mereka kuasai, baik dari Tanjung Harapan sampai ke Selat Magellan. Nusantara yang luas termasuk di antara wilayah atau tempat yang sudah dikuasai VOC.
 - c. Menandatangani kesepakatan dengan raja atau penguasa lokal. Perjanjian ini akan menguntungkan VOC.
 - d. Melawan mereka yang kebijakannya tidak sejalan dengan VOC.
 - e. Menerbitkan dan mencetak mata uang sendiri.
 - f. Menunjuk dan menentukan staf sendiri.
 - g. Mengelola pemerintahan sendiri di wilayah kolonial.
5. *Pelayaran Hongi*. Untuk menjaga kelancaran monopoli dagangnya, VOC menerapkan metode pelayaran Hongi. Kebijakan ini, yang juga dikenal sebagai Hongi Tochten, dikendalikan melalui eksplorasi dengan kapal, terutama ke wilayah timur Indonesia seperti Ambon, Maluku, Seram, dan Ternate-Tidore. Rute laut yang dilalui oleh kapal Kora-kora sangat terbatas, mengingat banyaknya pulau-pulau kecil di Indonesia timur. Kebijakan ini dirancang untuk sekaligus mengendalikan produksi rempah-rempah dan mengawasi monopoli perdagangan dengan sangat ketat. Di kapal VOC, area dan penduduk di mana budidaya dan penjualan rempah-rempah diizinkan ditandai. Perusahaan tersebut

menerapkan kebijakannya melalui metode seperti penyitaan paksa, perampokan, perbudakan, dan bahkan pembantaian. Pedagang dari Inggris, Spanyol, dan Portugal juga terlibat dalam aktivitas perdagangan di wilayah yang sama. Untuk menjamin perlindungan bagi semua kegiatan operasional, armada Kora-kora dikawal oleh pasukan militer yang dilengkapi dengan senjata lengkap dan meriam. Armada Kora-kora ini disuplai oleh penguasa di wilayah Maluku dan Ambon yang telah menandatangani perjanjian dengan penjajah Belanda (Bernike & Indriawati, n.d.). Secara umum, kebijakan yang berlaku adalah setiap keluarga wajib menanam sejumlah tertentu pohon cengkeh yang setiap tahunnya akan dipanen tepat sebelum akhir tahun. Namun, ketika produksi cengkeh di pasar Eropa terlalu berlebihan dan akibatnya harga cengkeh turun, VOC di Ambon mengadakan Hongitchten dan memotong (eksterasi) sejumlah pohon cengkeh di setiap daerah.

6. **Preangerstelsel.** Peraturan ini dikeluarkan oleh Belanda dan VOC untuk memaksimalkan keuntungan dari wilayah kolonial mereka. Peraturan tersebut memprioritaskan Parahyangan atau Priangan sebagai wilayah pengembangan perkebunan kopi. Istilah “preanger” berasal dari nama Priangan, yang sangat terkenal karena kopi berkualitas unggulnya. Melalui peraturan ini, penduduk Priangan diwajibkan menanam kopi dan menyerahkannya kepada bangsawan lokal, yang kemudian akan menjualnya kepada Belanda untuk diekspor ke pasar Eropa. Bangsawan yang terlibat dalam praktik kebijakan ini menerima komisi yang cukup besar sebagai bagian dari keuntungan mereka. Di sisi lain, penduduk harus menanggung ketidaknyamanan. Setelah enam tahun berlakunya peraturan tersebut, VOC menjadi kekuatan dominan di industri kopi. Dilaporkan bahwa mereka dapat mengendalikan perdagangan kopi dari setengah hingga tiga perempat total produksi kopi dunia. Sistem Preangerstelsel, pada gilirannya, menjadi cikal bakal kebijakan perkebunan paksa, yang terkait dengan istilah cultuurstelsel yang dikembangkan lebih lanjut oleh Belanda dan VOC (Sinaga, Pakpahan, et al., 2024).
7. **Menjadikan Masyarakat Asli Sebagai Alat Perpanjangan Tangan.** Dalam menerapkan peraturan, Belanda dan VOC jarang campur tangan secara langsung. Mereka lebih memilih untuk menjalin kemitraan dengan para pemimpin atau penguasa lokal yang telah dibujuk oleh janji kemakmuran dan kekuasaan. Melalui perantara-perantara ini, Belanda dan VOC dapat memperoleh manfaat untuk agenda mereka sendiri, dan sebaliknya. Belanda dan VOC berhasil memenangkan hati para penguasa dengan tawaran hadiah yang menggiurkan. Selain itu, mereka juga menjamin bahwa posisi para penguasa akan dilindungi dari persaingan politik dan dari kelompok-kelompok lain yang mungkin mencoba menentang mereka. Tentu saja, sangat sulit bagi mereka yang sangat terpesona oleh kekayaan dan kekuasaan untuk menolak tawaran tersebut. Peraturan yang diterapkan oleh Belanda dan VOC menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa hanya segelintir pejabat dan kolonialis yang menikmati manfaat dari kebijakan-kebijakan tersebut. Mereka dibayar dengan harga yang sangat rendah untuk produk yang mereka hasilkan. Keringat dari kerja keras mereka dihargai dengan upah yang hampir tidak mencukupi. Di sisi lain, aktivitas perdagangan Belanda dan VOC membawa mereka kesuksesan yang besar. Pasar Eropa menganggap komoditas dari tanah Indonesia sebagai produk baru. Pada saat itu, ekspor dari tanah air ke Eropa meningkat secara signifikan, meskipun dilakukan atas nama Kerajaan Belanda dan VOC. Disatu sisi, rendahnya biaya produksi, terdiri dari bahan baku murah dan tenaga kerja murah, membuat Belanda dan VOC semakin kaya. Tidak heran jika VOC mampu menarik 1.800 investor yang tersebar di seluruh Belanda. Dan tidak mengherankan jika VOC menjadi perusahaan terkaya pada masanya.

Tidak hanya itu, tetapi kebijakan VOC juga ditujukan kepada kerajaan Banten dan Mataram. Hal ini dilakukan karena terdapat potensi besar di kerajaan-kerajaan tersebut yang

akan menguntungkan Belanda di masa depan dengan meningkatkan pendapatan negara. Potensi tersebut meliputi komoditas-komoditas utama seperti gula merah, lada, kacang-kacangan, dan beras. Oleh karena itu, VOC akhirnya menetapkan dan mengumumkan kebijakan-kebijakan tertentu terkait sistem perdagangan dan wilayah kendali:

1. Membangun benteng dan menguasai beberapa pelabuhan untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Pelabuhan yang dikuasai oleh VOC adalah Pelabuhan Jayakarta. Pelabuhan tersebut awalnya dikuasai oleh Kesultanan Banten, kemudian VOC mengambil alih dan membangun Pelabuhan Jayakarta. Sebuah pusat kota bernama Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta, juga didirikan di pelabuhan tersebut. Melalui kota pelabuhan ini, VOC semakin mendominasi perdagangan di kepulauan tersebut.
2. Menunjuk seorang Gubernur Jenderal dengan tujuan mendominasi dan memperkuat posisi. Pada saat itu, lebih tepatnya dari tahun 1610 hingga 1614, Pieter Both adalah pemimpin pertama VOC yang bersama dengan ini meluncurkan kebijakan Pieter Both. Salah satunya adalah pendirian pos perdagangan di wilayah Banten dan juga penandatanganan perjanjian untuk mengendalikan rempah-rempah di Maluku. Kebijakan ini terus dilanjutkan melalui pemerintahan Gubernur Jenderal baru karena berhasil.
3. VOC melaksanakan semua hak octroi yang sepenuhnya diberikan oleh pemerintah Belanda. Hak-hak tersebut meliputi hak monopoli perdagangan, hak untuk memiliki mata uang sendiri, hak untuk menandatangani perjanjian dengan penguasa dan otoritas lokal, hak untuk membentuk tentara dan juga berperang, serta hak untuk mengumpulkan pajak.
4. Mendirikan markas besar VOC di Banten dan Ambon, dan kemudian dipindahkan ke Jakarta atas perintah seorang Gubernur. Markas besar Banten didirikan pada tahun 1603, setahun setelah VOC didirikan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan aktivitas perdagangan. Selain Malaka dan Makassar, Banten juga merupakan salah satu wilayah di kepulauan Indonesia di mana perdagangan rempah-rempah berpusat.
5. Pelayaran Hongi. Pelayaran ini tentu saja berada di bawah pengawasan ketat VOC untuk memastikan kelancaran monopoli rempah-rempah. Masyarakat juga diwajibkan memberikan kora-kora kepada VOC, yang akan digunakan untuk berdagang ke pulau-pulau lain.
6. Melaksanakan rencana politik "divide et impera" terhadap raja-raja saingan di Indonesia. Rencana ini merupakan strategi politik dan ekonomi, intinya adalah memperoleh kekuasaan dengan memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil. Serangan akan lebih mudah mencapai tujuan dominasi. Misalnya, jika ada dua kerajaan yang bertikai, VOC akan memihak salah satu pihak dengan membantu pihak tersebut. Dari bantuan yang diberikan, VOC akan menerima wilayah sebagai imbalan. Semakin luas wilayahnya, semakin besar pula wilayah tersebut berada di bawah kendali koloni Belanda di Indonesia.
7. Ada hak untuk menghancurkan rempah-rempah yang melebihi batas yang ditetapkan. Selama perjalanan ini, VOC menetapkan aturan dan membuat perjanjian dengan meminta raja dan penguasa lokal untuk menghancurkan pala dan cengkeh.
8. Adanya kewajiban yang disebut *verplichte leverantie*, yaitu suatu kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesai agar menjual rempah-rempah dengan harga yang telah ditetapkan. Rempah-rempah tersebut berupa hasil bumi, seperti tembakau dan kopi.
9. Pelaksanaan sistem yang disebut sistem Priangan, yang merupakan aturan yang melarang penjualan kopi kepada pedagang swasta. Selain itu, VOC juga menetapkan aturan bahwa kepala daerah wajib melakukan setoran wajib secara rutin dalam penanaman kopi.

Pengaruh dan Dampak Kebijakan VOC Pada Rakyat Indonesia

Ini adalah dampak kebijakan VOC terhadap rakyat Indonesia.

1. Kekuasaan raja berkurang atau bahkan sepenuhnya dikuasai oleh VOC.
2. Kerajaan dibagi-bagi dan kerajaan-kerajaan baru serta penguasa dalam pengaruh kekuasaan VOC dibentuk.
3. Hak eksklusif VOC (octroi) membuat penduduk Indonesia sengsara.
4. Rakyat mengetahui sistem perekonomian, sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan tentara bersenjata modern.
5. Kapal Hongi dapat digambarkan sebagai kombinasi antara penyitaan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan.
6. Hak untuk memberantas rakyat merupakan ancaman kematian bagi setiap harapan atau sumber penghasilan yang berlebihan.

Sistem (Cultuurstelsel) pasca tanam paksa yang diterapkan oleh VOC menjadi bagian dari monopoli ekonomi yang dilanjutkan oleh VOC. Skema ini memberikan keuntungan besar bagi Belanda, terutama dalam bentuk peningkatan produksi komoditas ekspor seperti kopi, gula, dan indigo. Hasil dari sistem penanaman paksa tersebut kemudian dijual kepada kekuasaan kolonial dengan harga yang tidak adil, sehingga sejumlah besar pendapatan mengalir ke kas Belanda untuk menutupi utang perang dan membiayai pembangunan di Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi kolonial lebih menguntungkan VOC/Belanda daripada kesejahteraan masyarakat lokal. Pada saat yang sama, hal ini menjadi sumber penderitaan yang besar bagi rakyat Indonesia. Petani dipaksa menyerahkan tanah mereka, dan bahkan mereka yang tidak memiliki tanah pun diwajibkan bekerja di perkebunan pemerintah selama sehari-hari. Akibatnya, banyak orang mengalami kelaparan, tingkat kematian meningkat, dan kesejahteraan sosial semakin menurun.

Penyerahan hasil pertanian dengan harga tetap merampas keuntungan petani; sebaliknya, mereka menjadi korban eksploitasi. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketegangan sosial antara rakyat dan pemerintah kolonial, yang pada akhirnya memicu munculnya berbagai bentuk perlawanan. Di sisi lain, sistem budidaya paksa juga memiliki dampak positif, seperti pengenalan metode pertanian baru, perbaikan infrastruktur, dan peredaran uang di komunitas pedesaan. Namun, manfaat-manfaat ini tidak sebanding dengan penderitaan dan penindasan yang dialami rakyat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi VOC melalui sistem budidaya paksa dapat dilihat sebagai contoh jelas eksploitasi kolonial yang menguntungkan, namun pada saat yang sama menghancurkan kesejahteraan penduduk asli. Sistem Pertanian Paksa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui peningkatan produksi komoditas ekspor dan aliran pendapatan yang menguntungkan bagi penjajah. Namun, dampak sosialnya kompleks dan mencakup ketegangan antara penduduk asli dan pemerintah kolonial, pemberontakan petani, serta konsekuensi dari penindasan dan eksploitasi (Sinaga, Putri, Siagian, Zikri, et al., 2025).

Praktek Monopoli dan Sistem Perdagangan

Keberadaan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan bunga pala di kepulauan Indonesia menjadi pendorong utama kemunculan kota-kota pelabuhan yang berkembang pesat berkat perdagangan internasional. Ternate, yang terletak di bagian timur kepulauan, telah lama diakui sebagai pusat perdagangan yang ramai dan dinamis. Wilayah ini telah menjadi sumber berbagai komoditas mentah yang menarik minat pedagang dari berbagai penjuru dunia (Sinaga, Vito, et al., 2024). Pedagang tersebut datang untuk berdagang, baik antar pedagang maupun dengan penduduk setempat. Perdagangan rempah-rempah di kepulauan ini bersifat

terbuka dan demokratis sebelum kedatangan VOC. Suasana perdagangan yang bebas dan terbuka memungkinkan penduduk lokal serta pedagang dari berbagai belahan dunia seperti Tiongkok, Arab, India, Gujarat, Persia, Portugis, Inggris, dan banyak lainnya untuk datang dan melakukan transaksi. Namun, situasi berubah drastis ketika VOC mulai mengukuhkan kekuasaannya di kepulauan ini. Wahyudi dan Agustono dalam Jurnal Swarnadwipa yang berjudul peranan Jan Pieterzoon Coen di bidang politik dan militer tahun 1619-1623, menyatakan bahwa VOC dikelola oleh dewan yang terdiri dari 17 orang, sehingga disebut Dewan Tujuh Belas (de Heeren XVII) (Wahyudi & Agustono, 2017). Di antara tujuan VOC di Indonesia adalah mengendalikan pelabuhan-pelabuhan penting, mengendalikan kerajaan-kerajaan di Indonesia, menerapkan monopoli atas semua rempah-rempah, menghindari persaingan yang tidak sehat di antara pedagang Belanda agar keuntungan dapat dimaksimalkan, dan memperkuat posisi Belanda dalam konfrontasi dengan Eropa dan Asia.

Sistem monopoli VOC dimulai dengan mengendalikan wilayah-wilayah strategis tempat rempah-rempah diproduksi. Pada tahun 1605, VOC merebut wilayah pertamanya di Indonesia, yaitu benteng Portugis di Ambon. Dengan berkoalisi dengan komunitas Muslim di Ambon, Belanda berhasil mengusir Portugis, merebut benteng tersebut, dan mengganti namanya menjadi Victoria. Benteng tersebut menjadi kediaman Gubernur Jenderal Hindia Timur Belanda pertama, Pieter Both, yang ditunjuk pada tahun 1610. Ekspansi VOC terus berlanjut ke berbagai bagian kepulauan Indonesia untuk memperkuat monopoli perdagangannya. Penduduk Banten yang berada di Jayakarta diusir, dan kota Jayakarta dibakar pada 30 Mei 1619. Jan Pieterzoon Coen mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, nama suku Jermanik yang dianggap sebagai nenek moyang Belanda, dan Batavia menjadi markas besar VOC. Upaya VOC untuk mendominasi perdagangan rempah-rempah menjadi lebih mudah setelah mereka memiliki benteng di Batavia. VOC melakukan ekspansi teritorial yang berkelanjutan dan mengendalikan pusat-pusat perdagangan penting di kepulauan, di antaranya Malaka pada 1641, Padang pada 1662, dan Makassar pada 1667. VOC juga menembus wilayah pedalaman seperti Mataram dan Banten yang merupakan sumber utama beras dan lada. Ekspansi ini dilakukan melalui perjanjian diplomatik dan aksi militer. Dengan menguasai lokasi-lokasi strategis ini, VOC berhasil mengendalikan rute perdagangan rempah-rempah utama dari sumber produksi hingga pelabuhan-pelabuhan penting.

Salah satu alat utama sistem monopoli VOC adalah patroli Hongi. Untuk mencegah pelanggaran peraturan monopoli dalam berbagai bentuk, VOC mengorganisir patroli yang disebut patroli Hongi. Wahyudi dan Agustono (2017:6) menjelaskan bahwa patroli tersebut menggunakan perahu tradisional bernama kora-kora, dan dalam kasus pelanggaran peraturan monopoli, petugas patroli Hongi dapat bertindak cepat. Patroli Hongi juga berhasil melakukan pemotongan besar-besaran pohon cengkeh di Maluku. Pemotongan besar-besaran pohon cengkeh oleh Belanda melalui patroli Hongi disebut sebagai "Extirpation", yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pohon cengkeh di pasar dunia. Sinaga dkk. (2024:395) berargumen bahwa VOC melakukan pemusnahan besar-besaran cengkeh di Maluku, yang disebut "Extirpation", dengan tujuan menjaga stabilitas harga cengkeh di pasar global. Satu langkah yang diambil VOC untuk mempertahankan monopoli perdagangan adalah dengan mengontrol distribusi rempah-rempah, sehingga mereka dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah (Afnatasia et al., 2024). Petani lokal dipaksa untuk menjual rempah-rempah mereka hanya kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan, dan penjualan kepada pedagang asing dilarang. Selain itu, salah satu langkah yang diambil oleh VOC adalah menebang pohon rempah-rempah yang tidak berada di bawah kendali mereka agar tidak terjadi perdagangan ilegal. Kebun rempah-rempah petani yang dianggap melanggar peraturan VOC dibakar dan ditebang habis. Sistem ini memungkinkan VOC untuk mempertahankan kendali

mutlak atas produksi dan pasokan rempah-rempah, sehingga dapat memanipulasi harga di pasar internasional untuk keuntungan mereka.

VOC selain melakukan eksplorasi dan pemberantasan Hongi, juga menerapkan sistem perdagangan paksa lainnya untuk memperkuat monopoli mereka. Salah satunya adalah Sistem Kontingen, yang berarti masyarakat harus membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian kepada VOC. Kebijakan ini memaksa masyarakat di berbagai wilayah negara di mana tanahnya berada di bawah kekuasaan VOC untuk menyerahkan hasil pertanian dan kebun secara langsung. Kebijakan lain adalah *Verplichte Leverantie* atau pengiriman wajib, di mana masyarakat diwajibkan menyerahkan hasil panen mereka hanya kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan secara sepihak oleh VOC sendiri. Orang-orang tidak dapat menjual hasil panen mereka secara bebas kepada pedagang lain, dan harga yang ditetapkan oleh VOC jauh lebih rendah. Barang-barang yang diserahkan seperti kayu, gula, pala, cengkeh, tembakau, kapas, lada, kopi, dan banyak komoditas lain yang memiliki nilai sangat tinggi di pasar internasional. VOC juga menerapkan kontrol ketat atas rute pelayaran dan distribusi perdagangan. Mereka memperkenalkan sistem pasbrief atau izin pelayaran, di mana setiap kapal, termasuk kapal-kapal asli, harus berlayar dengan izin dari VOC. Kapal yang ditemukan tanpa izin dapat disita dan muatannya dirampas. Praktik ini berhasil memotong rute perdagangan kepulauan yang telah berlangsung berabad-abad. VOC juga memperkenalkan sistem konvoi ketat untuk pengiriman rempah-rempah ke Eropa. Kapal dagang tidak diperbolehkan berlayar sendirian, tetapi harus menunggu dan berlayar dalam kelompok besar yang disertai kapal perang. Sistem ini dimaksudkan untuk melindungi muatan berharga mereka dari bajak laut, kapal Eropa pesaing, dan kemungkinan pemberontakan awak kapal. Dalam menjalankan monopoli mereka, VOC juga membangun jaringan administrasi yang kompleks. Mereka mendirikan pos perdagangan di pelabuhan-pelabuhan strategis yang berfungsi sebagai titik pengumpulan dan penyimpanan rempah-rempah sebelum dikirim ke Batavia dan kemudian ke Eropa.

Dampak VOC Terhadap Nusantara

Kehadiran VOC di Nusantara membawa dampak besar yang tercermin dalam dinamika politik wilayah kepulauan ini. Dari sisi negatif, VOC secara sistematis menggerus kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal dengan menerapkan politik adu domba, memaksakan perjanjian yang merugikan, serta campur tangan dalam suksesi penguasa. Kekuatan militer VOC membuat banyak kerajaan kehilangan otonomi, karena VOC dapat menurunkan atau mengangkat raja yang dianggap sejalan dengan kepentingannya. Campur tangan VOC dalam konflik internal istana, khususnya melalui strategi adu domba dan manipulasi kekuasaan, telah mengakibatkan hilangnya kedaulatan politik Mataram yang puncaknya ditandai dengan penyerahan kekuasaan oleh Pakubuwana II kepada VOC pada tahun 1749 dan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang secara resmi memecah kerajaan menjadi dua entitas terpisah (Masbait & Triwahana, 2025). Intervensi ini menciptakan struktur kekuasaan yang tidak stabil, memicu konflik internal, dan melemahkan fondasi politik tradisional Nusantara. Namun, di sisi lain, sebagian pengaruh VOC turut memperkenalkan sistem administrasi yang lebih terstruktur, pencatatan arsip pemerintahan, serta model birokrasi yang kemudian menjadi dasar bagi administrasi kolonial modern. Meski bertujuan mempertahankan kepentingan VOC, sistem pemerintahan yang mereka bangun berkontribusi pada transformasi tata kelola wilayah di beberapa daerah.

Dalam bidang ekonomi, dampak yang ditimbulkan VOC sangat signifikan dan umumnya bersifat negatif bagi masyarakat lokal. Monopoli perdagangan rempah-rempah membuat rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil panen mereka, karena VOC memaksa

pemasaran tunggal dengan harga yang ditentukan sepihak. Kebijakan tersebut diperparah dengan praktik *ekstirpasi*, yaitu pembongkaran tanaman rempah di wilayah yang dianggap berlebihan agar suplai dapat dikendalikan dan harga tetap tinggi. Sistem ini menciptakan ketergantungan ekonomi dan kemiskinan struktural, karena masyarakat kehilangan kontrol atas produksi dan distribusi komoditas utama mereka. Namun, di tengah dampak yang dominan merugikan, VOC juga membawa pengaruh positif berupa integrasi Nusantara ke jaringan perdagangan global, pengenalan sistem pasar yang lebih teratur, dan pembangunan infrastruktur awal seperti pelabuhan, gudang, dan jalur distribusi. Meskipun dibuat untuk kepentingan perusahaan, infrastruktur ini kelak menjadi dasar perkembangan ekonomi kolonial dan modern.

Dampak sosial kehadiran VOC juga terasa kuat dan kompleks. VOC menciptakan stratifikasi sosial baru yang lebih tajam melalui pemberian hak-hak istimewa kepada kelompok tertentu, baik bangsawan lokal yang menjadi sekutu maupun warga Eurasia yang bekerja dalam struktur VOC. Akibatnya, hubungan sosial masyarakat menjadi lebih hierarkis dan penuh ketidaksetaraan. Selain itu, kerja paksa, pemindahan penduduk, serta praktik eksploitatif memperburuk kesejahteraan masyarakat dan memicu berbagai bentuk perlawanan. Di sisi lain, kontak jangka panjang antara masyarakat Nusantara dan VOC juga memunculkan interaksi budaya yang menghasilkan gaya hidup baru, perkembangan literasi melalui arsip dan pencatatan administrasi, serta tumbuhnya komunitas masyarakat campuran (Indo-Eropa) yang kelak memengaruhi perkembangan sosial perkotaan. Meski tidak menghapus dampak buruk kolonialisme, dinamika ini memperkaya keragaman sosial dan menciptakan perubahan sosial budaya yang bertahan hingga periode kolonial selanjutnya.

Perlawanan Masyarakat di Nusantara Terhadap VOC

1. Perlawanan Oleh Kesultanan Mataram. Mataram dan Belanda awalnya memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Belanda, yang membawa keramik terbaik, diizinkan untuk membangun benteng (*loji*) dan pos perdagangan di Seriya. Belanda juga memberikan dua meriam terbaik kepada Kerajaan Mataram. Namun, seiring berjalannya waktu, perselisihan antara Mataram dan Belanda mulai muncul. Pada 8 November 1618, Gubernur Jenderal Perusahaan Hindia Timur Belanda, Jan Pieterzoon Coen, memerintahkan Van der Marct untuk menyerang Jepara. Insiden ini memperparah konflik antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram, Sultan Agung, segera mempersiapkan serangan terhadap pasukan VOC di Batavia. Serangan pertama terjadi pada tahun 1628. Pasukan Mataram yang dipimpin oleh Tumenanggung Baurekso tiba di Batavia pada 22 Agustus 1628. Pasukan ini kemudian diikuti oleh pasukan Tumenanggung Sura Agul Agul, dibantu oleh dua saudara Kiai Dipati Mandurojo dan Kiai Upa Santa. Tak kurang dari seribu prajurit Mataram tewas dalam perlawanan ini. Mataram segera mempersiapkan serangan kedua yang dipimpin oleh Kyai Adipati Juminah, Kiai A. Puger, dan K. A Purbaya. Serangan dimulai pada 1 Agustus 1629 dan berlangsung hingga 1 Oktober 1629. Serangan kedua juga gagal; selain kelemahan yang sudah ada dalam serangan pertama, Belanda secara besar-besaran menghancurkan gudang persediaan makanan. Selain Sultan Agung, perlawanan juga dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi dan Mas Said.
2. Perlawanan Oleh Kesultanan Gowa. Dalam lalu lintas perdagangan, Gowa menjadi pelabuhan penghubung antara rute perdagangan Malaka dan Maluku. Rempah-rempah dari Maluku tidak akan sampai ke Malaka sebelum terlebih dahulu dibawa ke Gowa, dan hal yang sama berlaku untuk arah sebaliknya. Menyadari pentingnya Gowa, VOC sangat ambisius untuk menaklukkan pelabuhan Gowa. Langkah yang diambil adalah memblokir Pelabuhan Sombaopu. Selain itu, kapal-kapal VOC diperintahkan untuk menghancurkan dan

menangkap tidak hanya penduduk asli tetapi juga kapal-kapal asing. Raja Gowa, Sultan Hasanuddin, menyadari situasi yang kritis dan mempersiapkan pasukannya beserta seluruh perlengkapannya untuk melawan VOC. Beberapa kerajaan yang menjadi sekutunya juga telah bersiap. Benteng-benteng di sepanjang pantai kerajaan telah dibangun. Sementara itu, VOC, dalam upaya menerapkan strategi adu domba, telah berinteraksi dengan seorang pangeran Bugis dari Bone bernama Arung Palaka. Perang antara VOC dan Gowa dimulai pada 7 Juli 1667. Pasukan VOC yang dipimpin oleh Spelman, didukung oleh pengikut Arung Palaka, memulai serangan terhadap Gowa. Karena kalah jumlah, benteng pertahanan pasukan Gowa, Barombang, direbut oleh pasukan Arung Palaka. Perselisihan tersebut diselesaikan melalui penandatanganan Perjanjian Bongaya, yang berisi poin-poin berikut:

- a. Gowa wajib mematuhi sistem hak monopoli dagang.
- b. Semua negara Eropa kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Gowa.
- c. Gowa diwajibkan menanggung biaya konflik bersenjata.
- d. Benteng-benteng VOC dibangun di wilayah Makassar.

Kemunduran dan Bubarnya VOC

Kemunduran VOC dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berlangsung secara bertahap. Kemunduran VOC merupakan hasil dari akumulasi masalah internal yang serius dan tekanan eksternal yang semakin kuat pada abad ke-18. Akibat korupsi dan kurangnya pengawasan administrasi menjadi pemicu konflik antara VOC dengan pemerintah Belanda (Sinaga, Vito, et al., 2024). Faktor internal yang paling dominan adalah korupsi dalam tubuh VOC. Para pejabat VOC melakukan penggelapan dana, perdagangan gelap, dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga perusahaan kehilangan banyak pendapatan. Beban biaya militer dan administrasi juga semakin berat, sementara pendapatan dari rempah tidak lagi sebesar sebelumnya. Struktur organisasi VOC yang terlalu besar dan tidak efisien membuat perusahaan ini sulit beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dunia (Purwanda 2017). Faktor eksternal juga mempercepat kehancuran VOC. Persaingan dengan Inggris dan Prancis semakin kuat, membuat VOC tidak lagi menjadi pemain utama di pasar Asia. Selain itu, terjadi perubahan selera pasar di Eropa: permintaan terhadap rempah-rempah menurun, lalu bergeser ke komoditas seperti teh, kopi, dan gula. Perubahan ini membuat rempah tidak lagi menjadi barang mewah bernilai tinggi, sehingga keuntungan VOC merosot. Meskipun VOC mencoba mengikuti tren perdagangan baru, perusahaan ini tidak mampu bergerak cepat akibat manajemen yang buruk. Keadaan politik Eropa yang penuh peperangan turut membebani VOC karena Belanda harus terus memberikan dukungan dana yang besar (Sutrisno 2018). Pada akhirnya, setelah mengalami kebangkrutan yang tidak dapat diselamatkan, VOC resmi dibubarkan pada tahun 1799. Seluruh aset, wilayah, dan kewenangan VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda, menandai peralihan dari dominasi perusahaan dagang menuju pemerintahan kolonial resmi di Nusantara (Wibowo 2019).

KESIMPULAN

VOC adalah perusahaan dagang dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa, disertai dengan kekuatan politik dan militer yang mempengaruhi kepulauan Indonesia selama hampir dua abad. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh VOC, seperti monopoli perdagangan melalui koloni, pajak, penyitaan tanah, pajak, pembayaran, kopi, serta sistem pelayaran Hongi dan sistem Preangerstelsel, sangat merugikan rakyat Indonesia karena sifat eksploitatifnya sebagai kekuatan kolonial. Monopoli ketat atas perdagangan rempah-rempah melalui pengambilalihan pelabuhan strategis, penjualan paksa, dan kekerasan menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia, seperti kemiskinan, kelaparan, dan hilangnya kedaulatan politik bangsa-

bangsa lokal. Hubungan baru dengan ekonomi dunia, pengenalan administrasi modern, dan pengembangan pusat perdagangan global merupakan beberapa dampak positif tidak langsung yang disebabkan oleh VOC, namun dampak-dampak ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan dampak negatif seperti memperparah siklus setan masalah ekonomi dan sosial, serta intervensi politik yang melemahkan kekuasaan raja-raja lokal. Perlawanan dari berbagai kesultanan merupakan manifestasi dari tekad mereka untuk menentang dominasi VOC, namun mereka seringkali tidak mampu mengalahkan kekuatan militer dan strategi politik “pecah belah dan kuasai” yang digunakan oleh VOC. Kehancuran VOC, yang disebabkan oleh korupsi internal, birokrasi yang tidak terorganisir, persaingan dengan negara-negara Eropa lain, dan pergeseran pasar global, mencapai puncaknya pada tahun 1799 ketika pemerintah kolonial Belanda secara resmi menggantikan perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnatasia, J., Tungkup, L., Sianturi, F. R., Santika, L., & Sanjaya, P. S. (2024). Kebijakan Ekspansi VOC dari Perdagangan Rempah Hingga Kolonialisme. *Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8755–8760.
- Bernike, R., & Indriawati, T. (n.d.). Empat Kebijakan Ekonomi VOC di Nusantara. *Kompas.Com*.
- Etania, R. B., & Indriawati, T. (2023). Empat Kebijakan Ekonomi VOC di Nusantara. *KOMPAS.Com*. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/10/180000279/empat-kebijakan-ekonomi-voc-di-nusantara>
- Masbait, S. F., & Triwahana. (2025). The Influence Of Dutch Colonialism On The Development Of The Islamic Mataram Kingdom In Java, 1749–1755. *Journal of Historical Education Studies*, 3(1), 1749–1755.
- Ocsanda, D., Wijaya, C. I., Azzam, M., & Haq, A. (2024). Oportunitas Pembentukan Entitas Kebudayaan Baru , Tinjauan Terhadap Ibu Kota Negara (Ikn) Indonesia 2024 Berdasarkan Sejarah Perpindahan Ibu Kota Voc 1619 Opportunity For New Cultural Entity Emergence , An Overview Of The Capital City (Ikn) of Indonesai *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(1), 1–12.
- Sartika, D., Sabana, S., Sinaga, R., & Situmeang, S. N. (2025). Hegemoni Ekonomi VOC di Nusantara: Analisis Monopoli Rempah-Rempah dan Dampaknya terhadap Pasar Global Abad ke-17. *Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 2(2), 969–976.
- Sinaga, R., Pakpahan, P., Natasha, K. N., & Sibarani, T. R. (2024). Hak Oktroi VOC di Nusantara (Indonesia). *Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 612–618.
- Sinaga, R., Putri, S. E., Siagian, Y. M., Nadia, & Silvia. (2025). Kebijakan Ekonomi Voc Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 303–310.
- Sinaga, R., Putri, S. E., Siagian, Y. M., Zikri, M. F., Sejarah, J. P., Sosial, F. I., & Medan, U. N. (2025). Kebijakan Ekonomi Voc Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Indonesia. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10, 303–310.
- Sinaga, R., Vito, J., Ocha, S., Tondang, P., & Larasati, S. (2024). Masa Pemerintahan VOC di Nusantara : Awal Kedatangan Hingga Penyebab Bubarnya VOC. *Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 389–397.
- Wahyudi, S., & Agustono, R. (2017). Peranan Jan Pieterzoon Coen Di Bidang Politik Dan Militer Tahun 1619-1623. *Jurnal Swarnadwipa*, 1(1), 1–8.